

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemajuan perekonomian suatu bangsa tergantung dilihat dari pertumbuhan ekonominya. Oleh karena itu, setiap negara selalu berusaha memacu tingkat pertumbuhan ekonominya. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah produk domestik regional bruto. Indonesia merupakan negara berkembang yang belum mencapai kondisi *steady state* dimana suatu perekonomian sudah berada dalam keadaan stabil dan tidak mudah terkena guncangan. Guncangan terlihat pada krisis ekonomi tahun 1998 yang membuat PDB mengalami penurunan yang cukup besar sekitar 0,56% dari tahun sebelumnya (Handayani 2015).

PDB Indonesia terus mengalami perubahan secara fluktuatif berarti laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga ikut mengalami perubahan secara berarti dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat mencapai 5,02 persen. Kemudian, pada tahun 2015 merosot menjadi 4,79 persen dan melonjak menjadi 5,02 persen pada tahun 2016 sementara ditahun 2017 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,1 persen. Dalam hal ini peran pemerintah sangatlah penting dalam mendorong kemajuan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah memiliki dua kebijakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang pengeluaran dan pendapatannya dengan tujuan untuk menciptakan tingkat kesempatan kerja yang tinggi tanpa inflasi (Sukirno 2013). Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penerimaan dan pengeluaran untuk mencapai tujuan seperti pertumbuhan ekonomi dan stabilitas perekonomian secara umum. Perubahan tingkat dan komposisi anggaran pemerintah baik pajak maupun pengeluaran pemerintah, dapat mempengaruhi variabel-variabel permintaan agregat dan tingkat aktifitas ekonomi, pola persebaran sumber daya, dan distribusi pendapatan (Soleh 2013).

Pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja, maupun memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi (Soleh 2013).

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain tenaga kerja, modal, dan kemajuan teknologi. Tenaga kerja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah dari segi jumlah (kuantitas) dan kualitasnya. Kualitas tenaga kerja akan dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain pendidikan dan kesehatan modal dibutuhkan manusia untuk mengelola sumber daya alam dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sementara teknologi yang sangat pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian pembangunan dan berefek pada lajunya pertumbuhan ekonomi. Di antara berbagai aspek ini, pendidikan dianggap yang memiliki peranan paling penting dalam menentukan kualitas manusia

Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan membutuhkan manusia yang berkualitas sebagai modal dasar bagi pembangunan. Manusia dalam peranannya merupakan subjek dan objek pembangunan yang berarti manusia selain sebagai pelaku dari pembangunan juga merupakan sasaran pembangunan. Dalam hal ini dibutuhkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendorong peran manusia dalam pembangunan. Oleh karenanya dibutuhkan investasi untuk dapat menciptakan sumber daya manusia yang produktif. Pengeluaran pemerintah dapat digunakan sebagai cerminan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu wilayah. Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai sektor-sektor publik yang penting, diantaranya investasi pada sektor pendidikan dan

kesehatan yang diharapkan akan berpengaruh pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Usmalıadanti (2011) dalam Handayani (2015).

Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia yang dilihat dengan tingkat kualitas hidup manusia di tiap-tiap daerah. Salah satu tolak ukur dalam melihat kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan (Handayani 2015).

Ahyani dalam Febrian (2014) memberikan pendapat bahwa dalam era otonomi daerah tidak lagi sekedar menjalankan instruksi dari pusat, tapi benar-benar mempunyai kekuasaan untuk meningkatkan kreativitas dalam mengembangkan potensi yang selama era otonomi bisa dikatakan terpasung. Pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, bukan hanya terkait dengan pembiayaan, tetapi juga terkait dengan kemampuan daerah. Terkait dengan hal itu, pemerintah daerah diharapkan semakin mendekatkan diri dalam berbagai kegiatan pelayanan publik guna meningkatkan tingkat kepercayaan, diharapkan tingkat partisipasi publik terhadap pemerintah daerah juga semakin tinggi.

Menurut Anggraeni (2017) Bahwa semakin besar pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan meningkat maka berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam hal ini apabila pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan meningkat sebesar 1% maka berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,58%, disektor kesehatan meningkat 1% maka akan berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,32%. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Widodo (2011) bahwa semakin serius pemerintah dalam memprioritas pengeluarannya disektor pendidikan dan kesehatan maka akan berpengaruh positif pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Dalam perkembangan Kota Ternate yang semakin meningkatkan akselerasi pembangunan daerahnya. Hal ini tentunya harus didukung oleh pembiayaan pembangunan yang memadai. Dimana program unggulan daerah selalu menjadi *mainstrem* dalam

penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian antara potensi penerimaan dan alokasi pembiayaan pembangunan haruslah dapat dioptimalkan sehingga pada akhirnya tujuan mensejahterakan rakyat dapat tercapai.

APBD Kota Ternate tahun 2013 mencapai Rp.41,435.000 milyar. Selanjutnya di tahun 2015 APBD Kota Ternate mencapai Rp.60.954.433.043 atau 94,27%. Dengan besarnya realisasi pengeluaran yang terjadi di tahun 2013 dan 2015 diharapkan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2018.

Pada perkembangan Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota ternate dari Tahun 2008 sampai 2017 mengalami peningkatan hal ini bisa dilihat dari tahun 2008 PDRB Kota Ternate mencapai 517.055, Tahun 2009 PDRB Kota Ternate mencapai 558.109, Tahun 2010 PDRB Kota Ternate mencapai 602.511, Tahun 2011 PDRB Kota Ternate Mencapai 652,37, Tahun 2012 PDRB Kota Ternate mencapai 4232.647, Tahun 2013 PDRB Kota Ternate mencapai 4556.617, Tahun 2014 PDRB Kota Ternate mencapai,4960. 419, Tahun 2015 PDRB Kota Ternate mencapai 5 357.318, Tahun 2016 PDRB Kota Ternate mencapai 5 785. 434, dan di Tahun 2017 PDRB Kota Ternate mencapai 6 224. 454. (Ternate Dalam angka 2011-2018)

Peranan pengeluaran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya (peranan fiskal) dapat diarahkan untuk menghasilkan barang dan jasa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak semua barang dan jasa dapat disediakan oleh sektor swasta. Menurut Guritno (2001) dalam Ibrahim (2014), penyediaan barang publik adalah seberapa banyak pemerintah harus disediakan untuk menyediakan barang publik dan berapa jumlah dana yang harus disediakan untuk penyediaan barang publik itu. Menurut Freddy Wangke (2001) dalam Ibrahim (2014) usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, tidak mungkin sepenuhnya perekonomian diserahkan pada mekanisme pasar, akan tetapi diperlukan adanya peranan pemerintah untuk mengatur perekonomian suatu daerah otonomi. Salah satu caranya dengan melakukan desentralisasi fiskal. Kebijakan desentralisasi diharapkan mampu meningkatkan efisiensi ekonomi dimaksudkan sebagai

peningkatan nilai dalam ukuran uang dari pengeluaran pemerintah yang diterima oleh pembayaran pajak, sedangkan nilai outputnya bertambah besar dari pemanfaatan sumber daya tersebut.

Dari penelitian yang pernah dilakukan tentang hubungan antara alokasi pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat sering tidak konsisten, bisa positif ataupun negatif. Hasil dan bukti sering berbeda pada negara maupun daerah. Sifat dari dampak pengeluaran pemerintah akan tergantung dengan kondisi daerah tersebut. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis pengaruh alokasi anggaran pengeluaran pemerintah pada sektor publik khususnya sektor pendidikan dan kesehatan yang terdapat pada APBD terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian skripsi ini dengan judul : *“Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor publik terhadap pertumbuhan ekonomi di kota ternate”*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka ada rumusan masalah yang dapat di ambil sebagai dasar kajian dalam penelitian yang dilakukan yaitu :

- Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan sektor kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Ternate.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah atas pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Ternate.

1.4 Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai bahan pembelajaran bagi mahasiswa terkait dengan pengeluaran pemerintah dan pemahaman terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan dapat digunakan untuk melihat pengaruh anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan terhadap upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Ternate.